

**PROSES PELAYANAN E-KTP DALAM USAHA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN BIDANG PENDIDIKAN
(STUDI DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATU KOTA BATU)**

M. Shofi, Sugeng Rusmiwari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: shofimuhamad9@gmail.com

Abstract: *The family hope program in the education sector is a social protection program that has the character of providing conditional cash assistance to very poor households in the education sector as a form of social protection by the government to the poor. Currently the number of beneficiaries up to 2018 reaches 10 million program beneficiaries, a number that is very much even though still from a small number of poor people in Indonesia. The general objective of the family program hopes in the education sector is to improve accessibility to education services in supporting the achievement of short-term quality of life and breaking the long-term poverty chain. The family hope program in the education sector is part of the family program component of hope which is the focus of poverty alleviation in the education sector which aims to change the lives of the poor so that they are more qualified in accordance with the abilities they sharpen in school. Actually the family hope program is a form of poverty alleviation, but this model does not involve the participation of the community as a whole, but only people who are classified as poor and have entered verification data that has been determined. Where the government has a big role in providing minimal assistance so that people can achieve a better quality of life than before.*

Keywords: *Family Hope, Education, Poverty Program*

Abstrak: Program keluarga harapan bidang pendidikan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan tunai bersyarat pada rumah tangga sangat miskin dalam bidang pendidikan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan 2018 mencapai 10 juta penerima manfaat program, jumlah yang sangat banyak walaupun masih dari sebagian kecil jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Tujuan umum program keluarga harapan bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dalam mendukung tercapainya kualitas hidup jangka pendek dan memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Program keluarga harapan bidang pendidikan merupakan bagian dari komponen program keluarga harapan yang menjadi fokus dalam pengentasan kemiskinan bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat miskin agar lebih berkualitas sesuai dengan kemampuan yang mereka asah dalam bersekolah. Sebenarnya Program keluarga harapan adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model seperti ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, namun hanya masyarakat yang memang tergolong miskin dan telah masuk verifikasi data yang telah ditentukan. Dimana pemerintah mempunyai peran besar dalam menyediakan bantuan minimal supaya masyarakat bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pendidikan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan seluruh negara di dunia dan hampir semuanya mengalami, kemiskinan juga di alami oleh negara yang belum berkembang dan negara sedang berkembang bahkan negara maju juga mengalami kemiskinan. Maka dari itu kemiskinan menjadi

konsen atau masalah yang harus diselesaikan oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat sulit bagi negara di dunia untuk diatasi sendirian. Maka dari itu membutuhkan kerja sama antar negara di dunia untuk mengatasinya. Hampir sepertiga penduduk di dunia ini mengalami kemiskinan sesuai dengan kriteria Word Bank bahwa klasifikasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menggunakan pendapatan per kapita per hari sebesar US\$1.9 Amerika sebagai tolak ukur.

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi fenomena tersebut, melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin mulai dari aspek ekonomi dan sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Kemiskinan seyogyanya di gambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara layak. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang mempunyai kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor sehingga orang miskin tidak bisa mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, serta motivasi fundamental dari cita cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Program keluarga harapan (PKH) pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara amerika latin dan karibia seperti Meksiko, Kolumbia, Brasil, Jamaica, Honduras, dan Nikaragua yang dikenal dengan program Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini terhitung sangat berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena program ini berusaha mengubah prilaku hidup rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan cara memberikan bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan. Akan tetapi penerimaanya menyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau layanan kesehatan ibu hamil dan anak balita, dan meningkatkan kehadiran sekolah secara rutin/teratur bagi anak anak RTSM yang memiliki usia usia sekolah SD-SMP-SMA.

Indonesia PKH mulai dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 dan di luncurkan di provinsi Gorontalo sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan dan mampu mempercepat pembangunan milenium (Milenium Development Goals atau MDGs). PKH terfokus dalam dua komponen besar permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun perlu di sadari tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan. Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang belum bisa mengenyam pendidikan. Karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sehingga mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak anaknya karena dengan kendala biaya yang begitu tinggi. Banyak anak anak usia 7-16 tahun yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga demi keberlangsungan hidup yang lebih bermartabat.

PKH bidang pendidikan memberi akses pendidikan yang lebih buat anak anak RTSM. Khususnya SD/MI dan SMP/MTS sampai SMA/MA, serta untuk mengurangi pekerja di bawah

umur di Indonesia. Untuk mencapai ini semua PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran proses belajar, minimal 85% dari hari efektif belajar di sekolah dalam sebulan, selama proses tahun ajaran berlangsung. Sehingga partisipasi penerima manfaat bantuan PKH bisa maksimal kalo ada prasyarat dalam pelaksanaannya untuk di penuhi.

Faktor penting penunjang pelaksanaan program yaitu peran tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang telah menerima bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah di dapat agar tepat sasaran. Karena Pendampingan merupakan proses komunikasi yang harus dilakukan secara rutin antara pendamping dengan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima dana PKH. Karena efektivitas komunikasi antara kedua aktor tersebut menjadi sangat penting untuk dilihat, karena komunikasi yang efektif di antara kedua aktor tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pada diri penerima dana tersebut, karena mengarah kepada perubahan yang positif dalam hal pengetahuan, sikap serta tindakan yang mempengaruhi RTSM dalam hal pendidikan. Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut Ainur Trihana, Koordinator PKH Kota Batu, data terbaru yang ia miliki berjumlah 2176. Yang awalnya hanya 656 dan bertambah 1520 kenaikan ini sangat signifikan tentunya ini bisa dijadikan pemerintah sebagai program prioritas sehingga mampu meminimalisir kemiskinan yang ada di kota batu. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak masyarakat miskin khususnya Desa Sumberejo kecamatan Batu setelah adanya Program Keluarga Harapan dengan Judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan di Desa Sumberejo kecamatan Batu Kota Batu”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus dalam penelitian adalah implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan bidang pendidikan, dan berikut komponen pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat) atau anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, dengan peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku. Lokasi penelitian di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian menggunakan purposive sampling dengan informan Pelaksana/Pendamping PKH, Kepala Desa, Penerima Manfaat PKH. Yang menjadi instrument dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, dan tehnik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Kemudian tehnik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data (data reduction), menyajikan data (data display), dan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan implementasi program PKH pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Kesempatan yang diberikan berupa akses tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dan bantuan PKH bidang pendidikan diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH

diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi khususnya di Desa Sumberejo.

Program pengentasan kemiskinan melalui Program PKH bidang pendidikan ini mengarah pada outcome atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan dari output atau keluaran yang akan di dapatkan output dari pengentasan kemiskinan ini memang hasilnya secara tidak langsung melainkan memerlukan waktu panjang. Outcome yang di harapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (RTSM) tentang pentingnya pendidikan anak- anak mereka yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi. Dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) pengentasan kemiskinan bidang pendidikan Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan Teori Edward III dalam Widodo (2017:96-107) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan impelentasi kebijakan.

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumber Daya
3. Faktor Disposisi
4. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor Faktor di atas menjadi pisau analisis yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur Implentasi Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan. Selain itu, Implementasi PKH bidang pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, dan pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan.

1. Faktor Komunikasi dalam kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency).
 - a. Tranformasi informasi (transmisi) dalam program PKH bidang pendidikan di Sumberejo telah di lakukan guna untuk memberi pemahaman kepada penerima manfaat tentang prasyarat dari program PKH pendidikan agar bisa dijalankan sesuai prosedur yang ada.
 - b. Kejelasan informasi dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan tentang kebijakan mengenai prasyarat yang harus di laksanakan sangat jelas dan penerima manfaat selama ini mengikuti mematuhi prasyarat tersebut.
 - c. Konsisitensi informasi dalam komunikasi yang di lakukan pendamping selama pelaksanaan telah dilakukan dengan konsisten dalam pertemuan wajib bulanan.
2. Faktor Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan.
 - a. Sumber daya manusia dalam hal pendamping selaku pelaksana program telah melaksanakan pendampingan secara maksimal kepada penerima manfaat bantuan PKH pendidikan
 - b. Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program PKH bidang pendidikan sumber keuangan langsung dari pemerintah pusat melalui kemensos dengan ketentuan jumlah nominal dan prasyarat yang telah di tentukan.
 - c. Sumber peralatan dalam pelaksanaan ini program PKH bidang pendidikan untuk mempermudah akses pencairan dana kepada penerima di beri fasilitas ATM sebagai alat untuk mencairkan bantuan tunai berupa uang
3. Faktor Disposisi Menurut Edwards III Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan, Karena dalam pelaksanaan implementasi yang menjadi cerminan adalah pimpinan dari program tersebut. Faktor disposisi Dalam implementasi program PKH bidang pendidikan yang menjadi tujuan adalah kebijakan yang diberikan kepada penerima manfaat melalui prasyarat prasyarat yang telah di tentukan oleh program

PKH untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan melalui program, pemberdayaan dan pendampingan dari pelaksana PKH.

4. faktor struktur birokrasi.

Menurut Edwards III Struktur Birokrasi Struktur ini mencakup aspek aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi frakmentasi dan standart prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. sesuai dengan teori Edward III tentang hubungan organisasi. Dalam hal standard operasional prosedur (SOP) implementasi yang di lakukan pelaksana program PKH bidang pendidikan dan penerima manfaat sudah dilakukan sesuai dengan buku Pedoman PKH.

Faktor penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah masing-masing, sehingga penangananya pun biasanya dikembalikan kepada masing masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implemetasi program. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping program di setiap masing masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program, tentunya juga akan menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi program. Berikut diuraikan faktor faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu. Karena faktor waktu pertemuan bulanan yang menjadi prasyarat penerima manfaat sering dari penerima manfaat tidak hadir dalam pertemuan bulanan, sehingga menghambat informasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program keluarga harapan. Berikut aspek aspek struktur Birokrasi dalam Edward III:

- a. Aspek struktur organisasi PKH Desa Sumberejo masuk dalam struktur organisasi UPPKH kecamatan Batu
- b. Aspek pembagian kewenangan PPKH desa Sumberejo hanya berwenang atau menangani PKH bidang pendidikan di Desa Sumberejo
- c. Aspek hubungan organisasi dalam pelaksanaanya hubungan organisasi di lakukan dengan oragnisasi yan struktur maupun dengan intansi lainya yang berhubungan dengan PKH bidang pendidikan.
- d. Standard Operasional Prosedur dalam pelaksanaanya PKH sudah di atur dalam Buku panduan pelaksanaan PKH.

Faktor pendukung Dalam implementasi Program PKH bidang pendidikan di Desa Sumberejo, selain penghambat, tentunya ada juga yang menjadi pendukung, sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk merealisasikan dengan baik. Sesuai tujuan umum dari Program PKH bidang pendidikan yaitu mengurangi angka dan memutus rantau kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah prilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan bidang pendidikan di Desa Sumberejo. Bahwasanya faktor pendukung Pelaksanaan Program PKH bidang pendidikan adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga menentukan dan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan faktor pembayaran dan pendanaan menajadi hal penting dalam penetu keberhasilan. Disamping itu pengawasan yang baik agar dalam pendanaanya sesuai denagan ketentuan.

KESIMPULAN

Implementasi PKH bidang pendidikan di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada, mulai dari proses pendataan awal yang dilakukan petugas/pendamping PKH di Desa Sumberejo. Pendampingan yang dilakukan petugas/pendamping PKH sudah dilakukan dengan baik. Proses pendistribusian dana PKH bidang pendidikan sudah dilakukan dengan baik oleh pendamping kepada peserta, lewat informasi yang dilakukan pendamping kepada penerima bantuan bidang pendidikan. Proses pengambilan dana PKH dilakukan peserta sendiri lewat ATM yang di bawa oleh penerima bantuan PKH setelah adanya konfirmasi atau informasi tentang pencairan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program PKH bidang pendidikan di Desa Sumberejo diantaranya : a. fasilitas Program PKH b. Pendampingan Pelaksana kepada Penerima manfaat PKH. Faktor penghambat implementasi program keluarga harapan (PKH) bidang pendidikan adalah a. masih sering adanya penerima manfaat yang tidak ikut pertemuan bulanan sehingga dalam penyampaian sosialisasi kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Edi Suharto, Ph.D. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung ; Alfabeta.
- Moleng, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Satori, Djam'an dkk. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sosial, Kementerian. 2012. *Buku pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, S., 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- UU No.11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (9) tentang Program Program Kesejahteraan Sosial.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 Tentang Jaminan Sosial Kepada Masyarakat.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 Tentang Kewajiban Pemerintah Dalam Mengentaskan Permasalahan Kemiskinan.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 Tentang Pemerintah Wajib Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Umum.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.